

REORIENTASI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2024 TERHADAP WAJIB PAJAK DI KOTA MEDAN

Bayu Widiyanto ¹, Chely Br Sembiring ², Hendri Yohannes ³

Fakultas Hukum,

Universitas Prima Indonesia, Medan

Email: bayuwidiyanto@unprimdn.ac.id

ABSTRACT

The principle of legal certainty and legality of tax collection is an important principle in a state of law as stated in the 1945 Constitution that Indonesia is a state of law and a tax cannot be collected without being regulated by law. The Mayor's Regulation is an implementing regulation that has binding legal force which is ordered by higher legislation or formed based on authority. The position of the Medan Mayor's Regulation Number 28 of 2024 raises a legal event. This study will critically examine and analyze, and normatively regarding the Mayor's Regulation based on the perspective of comparative law theory both from the decision of the constitutional court, the formation of regional legal products and relevant laws and enforcing the law in implementing it for taxpayers. This study aims to determine whether the formation of the Mayor's Regulation is in accordance with the authority and ordered by the Legislation and the validity of the law in implementing the Mayor's Regulation. The results of the study found that the Mayor's Regulation is an implementing regulation that does not have the authority to add non-normative substance, the Mayor's Regulation only has the authority to regulate administrative procedures. Officials who should not implement the Mayor's Regulation, if it conflicts with higher regulations based on the principle of *lex superior derogat legi inferiori*, in carrying out their duties and responsibilities must comply with the Laws and Regulations.

Keywords: Mayor Regulation Number 28 of 2024; Tax.

ABSTRAK

Prinsip kepastian hukum dan legalitas pungutan pajak merupakan prinsip penting dalam negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan suatu pajak tidak dapat dipungut tanpa diatur oleh Undang-Undang. Peraturan Walikota merupakan suatu peraturan pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kedudukan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 tahun 2024 menimbulkan perdebatan secara yuridis. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa secara kritis, dan normatif mengenai Peraturan Walikota tersebut berdasarkan perspektif teori perbandingan hukum baik dari putusan mahkamah konstitusi, pembentukan produk hukum daerah dan hukum yang berelevansi serta implikasi hukum dalam melakukan implementasi terhadap wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pembentukan Peraturan Walikota tersebut apakah sesuai dengan kewenangan dan diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan implikasi hukum dalam penerapan peraturan Walikota tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa Peraturan Walikota merupakan peraturan pelaksana yang tidak memiliki kewenangan untuk menambah substansi unsur normatif, Peraturan Walikota hanya memiliki kewenangan untuk mengatur tata cara yang bersifat administratif. Pejabat yang seharusnya tidak menerapkan Peraturan Walikota tersebut, apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berdasarkan Asas *lex superior derogat legi inferiori*, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab wajib tunduk pada Peraturan Perundang-undang.

Kata Kunci: Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2024; Pajak.